

ANALISIS KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Adam Ahmad Najib¹, Wardija²

^{1, 2}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: ahmadadamns@gmail.com

Keywords:

Public policy
 Infrastructure
 Public
 Transportation
 Public Service
 Tasikmalaya City

Abstract: In order to raise the standard of public services for the community, this study will examine Tasikmalaya City's public transportation and infrastructure regulations. The research methodology is a descriptive qualitative literature study that gathers information from policy papers, scholarly articles, journals, and other textual sources pertaining to public transportation and infrastructure. The study's findings show that the Tasikmalaya City government has undertaken a number of initiatives to enhance public service quality and community mobility through the construction of transportation infrastructure. There are still a number of challenges, though, including traffic jams, a lack of public transportation options, and uneven infrastructure development in some places. The study's conclusion demonstrates that in order for public services to function better and more effectively, Tasikmalaya City's infrastructure and public transportation policies must be optimized through more effective planning, sustainable management, and increased community-government coordination.

Kata Kunci:

Kebijakan Publik
 Infrastruktur
 Transportasi Publik
 Pelayanan Publik
 Kota Tasikmalaya

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat umum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data dari jurnal, artikel, dokumen kebijakan, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan transportasi umum dan infrastruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan beberapa inisiatif untuk mengembangkan infrastruktur transportasi guna meningkatkan kualitas dan mobilitas transportasi umum. Namun, masih ada beberapa masalah, seperti lalu lintas, fasilitas transportasi umum, dan kurangnya pengembangan infrastruktur di beberapa daerah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Tasikmalaya perlu dioptimalkan melalui perencanaan yang lebih efisien, implementasi yang lebih efektif, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat agar transportasi umum dapat beroperasi lebih efektif.

Pendahuluan

Salah satu aspek terpenting dari upaya pemerintah untuk secara efektif dan efisien memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan publik. Dalam konteks lokal, transportasi umum dan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendorong

mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Barat, Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan transportasi umum dan infrastruktur, seperti lalu lintas, fasilitas transportasi umum, dan kurangnya pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Situasi ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat umum (Tjiptono, 2017).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah setiap tindakan yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan transportasi umum dan infrastruktur berfungsi sebagai semacam tanggung jawab bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang dapat memaksimalkan aktivitas masyarakat. Infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan mobilitas, dan mendukung inisiatif pembangunan lokal.

Transportasi umum memiliki hubungan yang erat dengan kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi di suatu masyarakat. Penelitian tentang kebijakan transportasi di Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa daerah dengan sistem transportasi yang baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih tinggi daripada daerah dengan sistem yang kurang ideal. Selain itu, transportasi yang buruk dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan lainnya (Warpani, 2002).

Selain itu, menurut Van Meter dan Van Horn, beberapa faktor, seperti tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pekerjaan, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut teori ini, keberhasilan kebijakan transportasi umum tidak hanya bergantung pada perencanaan tetapi juga pada pelaksanaan dan pemantauan yang efektif.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan transportasi umum di Indonesia terus menghadapi beberapa tantangan, seperti kualitas layanan transportasi umum yang buruk, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, dan kurangnya integrasi antar moda transportasi. Di kota Tasikmalaya, peningkatan infrastruktur dan transportasi masih membutuhkan perhatian lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik mungkin (Tamin, 2000).

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan transportasi umum dan infrastruktur diimplementasikan di Kota Tasikmalaya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas transportasi umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya dan untuk memahami tantangan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) bagaimana kebijakan transportasi umum dan infrastruktur diimplementasikan di Kota Tasikmalaya; (2) kendala apa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut; dan (3) bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan transportasi umum dan infrastruktur.

Studi ini penting karena dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi umum dan infrastruktur. Secara praktis, diharapkan studi ini dapat membantu pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Tasikmalaya.

Tinjauan Literatur

Konsep dan Teori yang Relevan

Pelayanan publik adalah cara pemerintah untuk secara efektif dan efisien memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik mengacu pada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dalam konteks lokal, kondisi transportasi umum dan infrastruktur berdampak pada kualitas pelayanan publik karena dapat mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Kebijakan publik adalah pendekatan pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial. Menurut Dye (2017), kebijakan publik adalah apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu, Edwards III (1980) menyatakan bahwa komunikasi, aktivitas sehari-hari, sikap kerja, dan struktur infrastruktur semuanya memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Karena itu,

peningkatan transportasi umum dan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan standar pelayanan publik.

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Banyak penelitian tentang transportasi umum dan infrastruktur telah dilakukan. Menurut Tamin (2000), sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Warpani (2002) menyatakan bahwa masalah transportasi perkotaan disebabkan oleh meningkatnya penggunaan transportasi pribadi dan transportasi umum yang kurang ideal.

Menurut penelitian Hardiyansyah (2018), kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Namun, penelitian sebelumnya berfokus pada transportasi umum dan pelayanan secara umum daripada secara khusus meneliti implementasi kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Tasikmalaya. Karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan transportasi umum dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Tasikmalaya.

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Tamin (2000)	<i>Perencanaan dan Pemodelan Transportasi</i>	Sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Penelitian lebih berfokus pada perencanaan transportasi secara umum dan belum membahas kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.
2	Warpani (2002)	<i>Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>	Permasalahan transportasi perkotaan dipengaruhi oleh meningkatnya kendaraan	Penelitian belum mengkaji implementasi kebijakan transportasi publik

			pribadi dan kurang optimalnya transportasi umum.	secara spesifik di Kota Tasikmalaya.
3	Hardiyansyah (2018)	<i>Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya</i>	Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai.	Penelitian hanya membahas pelayanan publik secara umum dan belum menghubungkan dengan kebijakan infrastruktur transportasi daerah.
4	Penelitian Sekarang	<i>Analisis Kebijakan Infrastruktur dan Transportasi Publik di Kota Tasikmalaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</i>	Menganalisis implementasi kebijakan infrastruktur dan transportasi publik serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.	Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai hubungan kebijakan infrastruktur dan transportasi publik dengan kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.

Sumber : dikelola oleh penulis (2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa banyak penelitian telah dilakukan tentang transportasi umum dan infrastruktur. Menurut Tamin (2000), sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas publik dan mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Warpani (2002) menyatakan bahwa masalah transportasi umum biasanya disebabkan oleh meningkatnya penggunaan transportasi pribadi serta transportasi umum yang kurang ideal. Menurut penelitian Hardiyansyah (2018), kualitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya berfokus pada transportasi umum dan layanan secara umum, bukan secara khusus meneliti implementasi kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Tasikmalaya. Karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang menyoroti kurangnya pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan transportasi umum dan infrastruktur dengan kualitas layanan publik di Tasikmalaya. Studi ini berfokus pada implementasi kebijakan transportasi umum dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur (riset perpustakaan). Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena secara lebih bernuansa dan kurang digeneralisasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi terkini serta implementasi kebijakan transportasi umum dan infrastruktur berdasarkan berbagai sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan dokumentasi menggunakan data sekunder, seperti artikel jurnal, buku, artikel, dan dokumen kebijakan terkait.

Menurut Nazir (2014), studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan isu penelitian. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah analisis kualitatif deskriptif, yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data untuk memberikan wawasan tentang kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Tasikmalaya.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Infrastruktur di Kota Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas transportasi umum, khususnya di sektor jalan dan fasilitas transportasi. Pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan meningkatkan mobilitas antar kota di Kota Tasikmalaya. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki fasilitas transportasi, seperti trotoar, rambu lalu lintas, dan area transportasi umum di beberapa daerah. Infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan kebijakan infrastruktur ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik dan mendorong pembangunan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik dapat mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Ode & Mote, 2023). Selain itu, pembangunan fasilitas umum juga berfungsi sebagai cara bagi pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat saat menggunakan layanan publik. Diharapkan pembangunan infrastruktur akan memungkinkan penyampaian layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat umum.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan infrastruktur Kota Tasikmalaya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran pembangunan, kepadatan lalu lintas, dan kurangnya pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah. Situasi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan optimal dan membutuhkan tata kelola yang lebih efektif.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan infrastruktur. Menurut Moenir, pelayanan publik yang efektif harus diberikan oleh sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Tasikmalaya harus dilakukan secara bertahap melalui perencanaan

yang tepat, manajemen konstruksi, dan pemantauan yang efektif sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat.

Kondisi Transportasi Publik dan Pelayanan Masyarakat

Di Kota Tasikmalaya, transportasi umum memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Angkutan umum masih menjadi salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat umum untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan bahkan pemerintahan. Transportasi umum memudahkan masyarakat umum untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan biaya yang relatif rendah. Karena itu, transportasi umum merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas transportasi umum di seluruh kota.

Namun, menurut temuan studi tersebut, transportasi umum di Tasikmalaya masih belum beroperasi secara optimal. Ada beberapa masalah yang disebutkan, seperti kurangnya fasilitas transportasi secara umum, kesulitan menggunakan layanan transportasi, dan inefisiensi transportasi umum. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti halte, terminal, dan fasilitas transportasi di beberapa daerah masih memerlukan perhatian yang cermat dan pengembangan lebih lanjut. Situasi ini menyebabkan masyarakat umum lebih memilih menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum.

Menurut Sinambela, efektivitas pelayanan publik, kenyamanan, dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menjadi indikator kualitas pelayanan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas transportasi umum masih diperlukan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Moenir mengklarifikasi bahwa pelayanan publik yang efektif harus didukung oleh sarana dan prasarana yang sadar agar pelayanan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Infrastruktur transportasi, seperti kondisi terminal, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum, memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan transportasi publik. Jika infrastruktur yang tersedia tidak memadai, pelayanan publik juga akan terhambat dan tingkat dukungan masyarakat akan menurun.

Kepadatan lalu lintas juga merupakan salah satu tantangan dalam transportasi umum di Tasikmalaya. Meningkatnya jumlah pribadi kendaraan menyebabkan kepadatan lalu lintas di beberapa daerah, terutama di daerah yang padat penduduk. Situasi ini dapat menghambat mobilitas masyarakat dan mengurangi efektivitas layanan transportasi umum. Karena itu, kebijakan transportasi perlu lebih terintegrasi dan progresif agar sistem transportasi umum dapat berfungsi lebih efektif.

Menurut Edward III, komunikasi, aktivitas sehari-hari, disposisi kerja, dan struktur birokrasi semuanya memengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Koordinasi antara pemerintah, penyedia transportasi, dan masyarakat umum sangat penting untuk meningkatkan kualitas transportasi umum. Diharapkan transportasi umum di Kota Tasikmalaya akan beroperasi lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum secara menyeluruh dengan infrastruktur yang baik.

Upaya peningkatan Kualitas Pelayanan

Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan banyak inisiatif untuk meningkatkan kualitas transportasi umum dan infrastruktur. Proyek tersebut dilakukan melalui perbaikan jalan, peningkatan fasilitas transportasi, dan penataan kawasan lalu lintas di beberapa wilayah. Tujuan dari peningkatan infrastruktur adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan meningkatkan mobilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga melakukan perbaikan transportasi umum. Pemasangan rambu lalu lintas, pengawasan arus kendaraan, dan peningkatan fasilitas transportasi umum merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan. Diharapkan upaya ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi pelayanan transportasi umum di Tasikmalaya. Menurut Hardiyansyah (2018), kualitas pelayanan publik dapat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang mudah, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Menurut Moenir, pelayanan publik yang efektif harus diberikan oleh sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara sebaik mungkin. Karena

itu, peningkatan transportasi umum dan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas transportasi umum di Tasikmalaya.

Diskusi

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Pembangunan jalan, pembangunan lalu lintas, dan penyediaan fasilitas transportasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pernyataan Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat. Dengan penerapan kebijakan ini, pemerintah ditugaskan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Namun, implementasi kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Tasikmalaya terus menghadapi beberapa tantangan. Kemacetan lalu lintas, keterbatasan sarana transportasi umum, dan pembangunan infrastruktur yang belum selesai adalah beberapa masalah yang disebutkan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan semulus yang seharusnya. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor sumber daya, koordinasi antar organisasi, dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih optimal agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kualitas pelayanan transportasi umum merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses dapat membantu masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Hal ini berkaitan dengan pendapat Sinambela, yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang baik dan tepat. Menurut penelitian Dwiyanto (2021), kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian pelayanan dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, perbaikan transportasi dan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pengembangan transportasi umum dan infrastruktur di Kota

Tasikmalaya harus dilakukan secara sistematis agar kualitas transportasi umum dapat terus meningkat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode penelitian literatur, yang berarti data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, artikel, dan dokumen resmi. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, sehingga hasilnya masih berdasarkan analisis teoritis. Karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan metode observasi atau wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kondisi transportasi umum dan infrastruktur di Tasikmalaya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, masih ada sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan di bidang fasilitas, manajemen konstruksi, dan transportasi umum agar pelayanan bagi masyarakat umum dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan transportasi umum dan infrastruktur di Kota Tasikmalaya sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, lalu lintas penyeberangan, dan pengembangan infrastruktur transportasi umum, menunjukkan komitmen untuk mempromosikan mobilitas dan kebutuhan masyarakat. Transportasi dan infrastruktur yang baik dapat memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti lalu lintas yang macet, keterbatasan fasilitas transportasi umum, dan pembangunan infrastruktur yang terbatas di beberapa daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan transportasi umum masih perlu ditingkatkan dengan operasi yang lebih efisien, proyek pembangunan, dan fasilitas yang mudah diakses oleh masyarakat umum.

Studi ini berkontribusi pada evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi umum dan infrastruktur di kota. Diharapkan temuan studi ini akan menjadi

dasar evaluasi dan tindakan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Amma, G. M., Bagus, N., & Suprojo, A. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn. *Lenvari: Journal of Social Science*, 2(1), 1-7.
- Apipah, S. (2024). Analisis Sistem Angkutan Umum Kota Tasikmalaya Menggunakan Network Analysis dan Geographic Information System. *Jurnal Industrial Galuh*, 6(2), 81-88.
- Arifin, P., Muhafidin, D., & Pancasilawan, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Transportasi Indonesia: Studi Literatur Review Pembelajaran Dengan Korea Selatan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 1169-1179.
- Asmawi, A., Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Masalah Dan Dinamika Implementasi Kebijakan Publik Tentang Transportasi (Kajian Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 205-218.
- Dwitama, M. K., Fadhila, G. N., Afgiansyah, R., Fakhri, M., Zamzam, A. M., & Astuti, Y. S. (2024). Analisis Kesesuaian Transportasi Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Tasikmalaya: Belajar dari Model Transjakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(5), 569-578.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Gava Media.
- Herdiana, D. (2025). Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli: Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 54-60.
- Kurniawan, I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Bus Transjakarta (Busway) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan. *Jurnal ilmiah ilmu administrasi*, 9(2).
- Ode, S., & Mote, M. K. (2023). Implementasi Transportasi Publik Terintegrasi Di Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 337-343

- Rahman, I. N., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 3(1).
- Setiadi, W., Sinjar, M. A., & Sugiyono, H. (2019). Implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah menurut hukum adat di tanjungsari, kabupaten bogor. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1).
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9-19.
- Supriyatna, A., & Maria, V. (2017). Pengukuran tingkat kepuasan pengguna sistem informasi DJP Online pelaporan SPT pajak. *Prosiding Snatif*, 147-154.
- Tamin, O. Z. (2000). Perencanaan dan pemodelan transportasi. Penerbit Itb
- Tjiptono, F. (2017). Pemasaran strategik: mengupas pemasaran strategik, branding strategy, customer satisfaction, strategi kompetitif, hingga e-marketing.
- Zamzam, A. M., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2024). ANALISIS POLA PENYEBARAN PENDUDUK DAN KUALITAS HIDUP DI KAWASAN PERKOTAAN TASIKMALAYA. *DENALI*, 1(2).